

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR ARTHA HUDA ABADI
TAHUN 2022**



PT. BPR ARTHA HUDA ABADI

**Jl. Pati-Tayu, Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati
TELEPON: 0295452436**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG-Good Corporate Governance) pada PT BPR Artha Huda Abadi pada tahun 2022 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2022 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator Otoritas Jasa Keuangan sehingga PT. BPR Artha Huda Abadi dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Pati. Dalam menjalankan operasional perbankan PT. BPR Artha Huda Abadi senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking practices). Hal ini sudah menjadi kebutuhan PT. BPR Artha Huda Abadi dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/ SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi PT. BPR Artha Huda Abadi dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu:

1. Keterbukaan (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (fairness)

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	H. Amin Salafuddin,SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR Artha Huda Abadi;</p> <p>b. Mengelola PT. BPR Artha Huda Abadi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Artha Huda Abadi;</p> <p>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Artha Huda Abadi di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/ atau Otoritas Lainnya;</p> <p>e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:</p> <p>1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan</p> <p>2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.</p> <p>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;</p> <p>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</p> <p>i. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>j. Menetapkan kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>k. Menetapkan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>l. Melaksanakan pedoman dan tata kerja yang meliputi Etika kerja, waktu kerja dan Peraturan rapat.</p> <p>m. Menetapkan kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</p>			
2.	Nama	:	H. Dliaul Khaq,M.M
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional sekaligus Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan:</p> <p>a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional PT. BPR PT BPR ARTHA HUDA ABADI</p> <p>b. Menyusun rencana kerja bidang keuangan untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan RUPS;</p> <p>c. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan operasional bidang keuangan;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam bidang keuangan;</p> <p>e. Memastikan bahwa proses manajemen risiko aktivitas TSI terintegrasi dalam manajemen risiko PT. BPR Artha Huda Abadi secara keseluruhan;</p> <p>f. Melaksanakan RBB dalam bidang TSI.</p> <p>g. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan PT. BPR Artha Huda Abadi</p>			

telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas lainnya, dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perundang-undangan lain;

h. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR Artha Huda Abadi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;

i. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

j. Melaporkan kepada Direktur utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan PT. BPR Artha Huda Abadi;

k. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);

l. Menetapkan kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);

m. Menetapkan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris terkait:

1. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola
2. Penunjukkan akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
3. Pembukaan Kantor Kas Tambakromo dan Kantor Kas Mlonggo
5. Penerapan Manajemen Risiko
6. APU-PPT
7. Temuan Pemeriksaan OJK
8. Memonitor debitur yang terdampak COVID-19.
9. Temuan Audit Internal

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	H. Abdul Ghofarrozin,M.Ed.
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Artha Huda Abadi di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai Debitur inti, Debitur terkait, dan debitur bermasalah; d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian UAng (APU) dan Pencegahan Penbanaan Terorisme (PPT); f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE. Audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya; h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan; i. Memastikan PE. Audit Intern dan PE. Manajemen Ridiko menjalankan tugasnya secara efektif; j. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.		
2.	Nama	:	H. Ghufron Halim,S.E,M.M
	Jabatan	:	Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab :
<p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</p> <p>c. Memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE. Audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan, dan/ atau otoritas lainnya;</p> <p>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :</p> <p>1) Pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategi dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Komisaris;</p> <p>i. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
Rekomendasi Kepada Direksi :
<p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola 2. Penunjukkan akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 3. Pembukaan Kantor Kas Tambakromo dan Kantor Kas Mlonggo 5. Penerapan Manajemen Risiko 6. APU-PPT 7. Temuan Pemeriksaan OJK 8. Memonitor debitur yang terdampak COVID-19. 9. Temuan Audit Internal
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tidak ada	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak Ada

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
2.	Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
Penjelasan Lebih Lanjut				
Tidak Ada				

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Amin Salafuddin,SE	Rp165.100.000,00	2.75%
2.	H. Dliaul Khaq,M.M	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Amin Salafuddin,SE	620100	PT BPRS Artha Mas Abadi	3.53%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	H. Amin Salafuddin,SE	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada
2.	H. Dliaul Khaq,M.M	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	H. Amin Salafuddin,SE	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada
2.	H. Dliaul Khaq,M.M	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Abdul Ghofarrozin,M.Ed.	Rp3.842.700.000,00	64.05%
2.	H. Ghuftron Halim,S.E,M.M	Rp1.106.100.000,00	18.43%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak Ada			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Abdul Ghofarrozin,M.Ed.	620100	PT BPRS Artha Mas Abadi	52.94%
2.	H. Ghuftron Halim,S.E,M.M	620100	PT BPRS Artha Mas Abadi	8.23%
3.	H. Ghuftron Halim,S.E,M.M	620063	PT BPRS Gala Mitra Abadi	80.26%
4.	H. Ghuftron Halim,S.E,M.M	620167	PT BPRS Saka Dana Mulia	83.02%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. Abdul Ghofarrozin,M.Ed.	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada
2.	H. Ghuftron Halim,S.E,M.M	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada, Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. Abdul Ghofarrozin,M.Ed.	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada
2.	H. Ghufron Halim,S.E,M.M	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada	Tidak Ada - Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp432.000.000,00	2	Rp318.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp456.000.000,00	2	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp161.200.000,00	2	Rp94.500.000,00
Total			Rp1.049.200.000,00		Rp412.500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Tidak ada	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	10 Januari 2022	4	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris tentang Rencana RUPS manajemen BPR dan Evaluasi Kinerja tahun 2021
2.	10 Maret 2022	2	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris tentang Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Persiapan bulan Ramadan 1443 H
3.	27 Mei 2022	2	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris tentang Evaluasi Kinerja Perusahaan, Pelaksanaan Undian Tasbih Kelompok VII, dan Rencana kerjasama dengan Bank Jabar Banten (BJB)
4.	08 Agustus 2022	2	1. Evaluasi Kinerja Direksi 2. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 3. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan Manajemen Risiko
5.	10 Oktober 2022	2	1. Evaluasi Kinerja Direksi 2. Tanggapan/ Penilaian Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 3. Tanggapan. Penilaian Pelaksanaan Manajemen Risiko
6.	01 Desember 2022	4	1. Penentuan Jasa KAP 2. Penetapan Rencana Bisnis Bank
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Tidak ada			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	H. Abdul Ghofarrozin,M.Ed.	6	0	100%
2.	H. Ghufron Halim,S.E,M.M	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Artha Huda Abadi								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		



K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	H. Abdul Ghofarroz in	Komisaris Utama	H. Amin Salafuddi n,SE	Direktur Utama	Sewa Kantor Kas Jaken	75 juta rupiah	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	07 Januari 2022	Sosial	Bantuan pembebasan lahan untuk tempat TPQ Yayasan Roudlotul Falah	TPQ Yayasan Roudlotul Falah	Rp700.000,00
2.	21 Februari 2022	Sosial	Bantuan untuk kegiatan KKN Unisnu Jepara	Unisnu Jepara	Rp150.000,00
3.	28 Maret 2022	Sosial	Bantuan dana untuk Musholla Nurul Islam Blingoh - Jepara	Musholla Nurul Islam Blingoh - Jepara	Rp1.000.000,00
4.	06 April 2022	Sosial	Bantuan untuk peringatan Harlah STIEF ke 9 dan Gebyar Ramadan 21 Century Skills	IPMAFA	Rp200.000,00
5.	14 April 2022	Sosial	Bantuan dana untuk pelatihan MC bahasa Jawa	NU MWC Margoyoso	Rp150.000,00
6.	21 April 2022	Sosial	Bantuan untuk Kelompok Musisi Jalanan Tayu	Kelompok Musisi Jalanan Tayu	Rp150.000,00
7.	27 April 2022	Sosial	Bantuan dana untuk penambahan fasilitas Musholla Babussalam Ds. Waturoyo Kec. Margoyoso	Musholla Babussalam Ds. Waturoyo	Rp200.000,00
8.	28 April 2022	Sosial	Bantuan dana untuk UPZIS Masjid Baitul Izzah	Panitia UPZIS Masjid Baitul Izzah	Rp1.000.000,00
9.	28 April 2022	Sosial	Bantuan dana untuk zakat dan sodaqoh Desa Waturoyo Kec. Margoyoso	Panitia Zakat dan Sodaqoh Desa Waturoyo Kec. Margoyoso	Rp1.000.000,00
10.	31 Mei 2022	Sosial	Iuran bersih Desa	Panitia Bersih	Rp250.000,00



PT. BPR ARTHA HUDA ABADI

			Doropayung	Desa Doropayung	
11.	06 Juni 2022	Sosial	Bantuan pembuatan kaos Guru TK Dharma Wanita Purwodadi, Margoyoso	TK Dharma Wanita Purwodadi	Rp250.000,00
12.	07 Juni 2022	Sosial	Sumbangan sedekah bumi Desa Mojo Kec. Cluwak	Pemerinta Desa Mojo	Rp120.000,00
13.	20 Juni 2022	Sosial	Bantuan dana untuk acara Olimpiade SKI MI se Kab Pati	IPMAFA	Rp200.000,00
14.	23 Juni 2022	Sosial	Bantuan dana sedekah bumi Desa Jatihadi Kec. Sumber Rebang	Desa Jatihadi Kec. Sumber Rebang	Rp200.000,00
15.	18 Juli 2022	Sosial	Bantuan dana sedekah bumi Ds. Manjang Kec. Jaken - Pati	Ds. Manjang Kec. Jaken	Rp700.000,00
16.	20 Juli 2022	Sosial	Sumbangan kepada karyawan korban banjir	Rumiasih	Rp2.886.500,00
17.	20 Juli 2022	Sosial	Bantuan dana untuk HUT RI Ke. Jaken	Pemerintah Kec. Jaken	Rp300.000,00
18.	28 Juli 2022	Sosial	Bantuan dana untuk acara Waturoyo Bersholawat menyambut Tahun Baru Hijriyah	Panitia Waturoyo Bersholawat	Rp200.000,00
19.	29 Juli 2022	Sosial	Bantuan dana untuk acara Haul 10 Syuro	Panitia Haul 10 Syuro Kajen	Rp500.000,00
20.	01 Agustus 2022	Sosial	Bantuan dana untuk acara HUT RI Kec. Margoyoso	Pemerintah Kec. Margoyoso	Rp450.000,00
21.	01 Agustus 2022	Sosial	Bantuan dana untuk acara haul Mbah Shofwan Tanjungrejo Kec. Margoyoso	Panitia Haul Mbah Shofwan Tanjungrejo	Rp250.000,00
22.	03 Agustus 2022	Sosial	Bantuan dana untuk acara Roadshow LDNU MWC Margoyoso	Panitia Acara Roadshow LDNU MWC Margoyoso	Rp200.000,00
23.	04 Agustus 2022	Sosial	Bantuan dana dalam rangka HUT RI ke 77	Panitia HUT RI Kec. Cluwak	Rp150.000,00
24.	09 Agustus 2022	Sosial	Bantuan dana Acara Gerakan Pramuka SMP 2 Tambakromo	Panitia Acara Gerakan Pramuka SMP 2 Tambakromo	Rp500.000,00
25.	11 Agustus 2022	Sosial	Bantuan dana Gebyar PAUD Muslimat NU memperingati Tahun Baru Hijriyah	PAUD Muslimat NU Bina Bhakti	Rp250.000,00
26.	12 Agustus 2022	Sosial	Bantuan dana HUT RI ke 77	Panitia HUT RI Kec. Juwana	Rp250.000,00
27.	18 Agustus 2022	Sosial	Bantuan dana	TK Dharmawanita	Rp150.000,00



			Kegiatan Manasik Haji Anak	Tanjungreja	
28.	22 Agustus 2022	Sosial	Bantuan dana untuk pelatihan Digital MARKeting dan Sertifikasi Halal	IPMAFA	Rp200.000,00
29.	30 Agustus 2022	Sosial	Sumbangan Pengadaan Mobil Layanan Umat	Muslimat NU Kab. Pati	Rp1.000.000,00
30.	31 Agustus 2022	Sosial	Sumbangan dana kegiatan Diklatama DKACCBP - KPP Margoyoso	DKACCBP - KPP Margoyoso	Rp500.000,00
31.	05 September 2022	Sosial	Sumbangan dana pembuatan seragam Guru TK PGRI Waturoyo	TK PGRI Waturoyo	Rp250.000,00
32.	20 September 2022	Sosial	Sumbangan dana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2022 M	Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Musholla Al Muhlusun Sambilawang	Rp150.000,00
33.	22 September 2022	Sosial	Sumbangan dana untuk finishing pagar & pengecoran perkiran Makam Mojo Lembah Mojo	Panitia Pembangunan Makam Mojo Lembah Mojo	Rp250.000,00
34.	22 September 2022	Sosial	Sumbangan untuk kegiatan reuni akbar alumni IPMAFA lintas Generasi	IPMAFA	Rp200.000,00
35.	13 Oktober 2022	Sosial	Sumbangan dana kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW	SDN Tayu Wetan 01	Rp200.000,00
36.	14 Oktober 2022	Sosial	Sumbangan dana kegiatan haul KH Mahfudz Salam & KH.M.A Sahal Mahfudz	Panitia Haul KH Mahfudz Salam & KH.M.A Sahal Mahfudz	Rp7.000.000,00
37.	26 Oktober 2022	Sosial	Sumbangan pembangunan Gedung TPQ Nurul Hikam	Panitia Pembangunan Gedung TPQ Nurul Hikam	Rp200.000,00
38.	02 November 2022	Sosial	Bezuk Hj. Nafisah Sahal (Pemegang saham)	Hj. Nafisah Sahal	Rp2.000.000,00
39.	15 November 2022	Sosial	Sumbangan wafatnya Ibu Hj Nafisah Sahal	Keluarga Ibu Hj. Nafisah Sahal	Rp10.000.000,00
40.	29 November 2022	Sosial	Sumbangan gempa Cianjur	Korban Gempa Cianjur	Rp2.000.000,00
41.	30 November 2022	Sosial	Sumbangan beasiswa Wisudawan Terbaik IPMAFA	IPMAFA	Rp1.000.000,00
42.	05 Desember 2022	Sosial	Sumbangan berupa	Korban Banjir	Rp4.530.000,00



			sembako kepada nasabah korban banjir wilayah Tambakromo	Tambakromo	
43.	06 Desember 2022	Sosial	Sumbangan 175 paket makanan kepada korban banjir wilayah Kec. Tambakromo	Korban banjir Tambakromo	Rp2.212.500,00
44.	09 Desember 2022	Sosial	Sumbangan kegiatan si Semar (Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri)	Panitia Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri - Unnes	Rp200.000,00
45.	12 Desember 2022	Sosial	Sumbangan kematian Ibu kolega BPR (Ibu dr Bp Yusuf Nafi)	Kel Bapak Yusuf Nafi	Rp1.000.000,00
46.	12 Desember 2022	Sosial	Sumbangan kematian Ayah kolega BPR (Ayah Bp Noor Qodin)	Kel Bapak Noor Qodin	Rp500.000,00
47.	20 Desember 2022	Sosial	Sumbangan kegiatan Syariah Ekonomi Training STIEF IPMAFA	Panitia SET STIEF IPMAFA	Rp200.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR ARTHA HUDA ABADI
Alamat	: Jl. Pati-Tayu, Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati
Nomor Telepon	: 0295452436
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp12.393.354.107,00
Total Aset	: Rp170.739.867.340,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR ARTHA HUDA ABADI Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.00	0.400
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.05	0.308
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.40	0.240
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.00	0.200
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.00	0.200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			2.000
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2)

Jumlah anggota Direksi PT. BPR Artha Huda Abadi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang sekaligus sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.05)

Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT. BPR Artha Huda Abadi tidak menerapkan Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.4)

PT. BPR Artha Huda Abadi telah memiliki Kebijakan Pedoman penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

PT. BPR Artha Huda Abadi telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfugsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah - langkah preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lainnya

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

PE Audit Intern di PT. BPR Artha Huda Abadi telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Internal dan kewajiban pelaporan ke Pihak Otoritas Jasa Keuangan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

PT. BPR Artha Huda Abadi telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil audit eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi BPR

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

PT. BPR Artha Huda Abadi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

PT. BPR Artha Huda Abadi telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara benar dan disiplin. PT. BPR Artha Huda Abadi dalam menjalankan operasional



selalu berhati - hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis Bank PT. BPR Artha Huda Abadi telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi kondisi keuangan dan Non Keuangan PT. BPR Artha Huda Abadi telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT. BPR Artha Huda Abadi juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

Faktor positif aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing - masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT. BPR Artha Huda Abadi masih dibutuhkan rekrutmenSDM yang berkualitas

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara Faktor Negatif aspek proses tata kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat mereson perkembangan, tantangan bisnis dan operasional bank yang terjadi saat ini

Pati, 19 Januari 2023

PT BPR ARTHA HUDA ABADI

H. ABDUL GHOFARROZIN, M.Ed
Komisaris Utama



H. AMIN SALAFUDDIN, SE
Direktur Utama